KENDALA DAN DAMPAK PEMEKARAN KEPENGHULUAN

Lindam Dewi

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Constraints and Impact Redistricting Kepenghuluan. This study aims to analyze the constraints and the impact of the expansion kepenghuluan Tanjung Medan District of Rokan Hilir. The method used is a qualitative approach. The results showed the formation kepenghuluan in the district of Tanjung Medan the parties agree and disagree Head, Sekcam, Penghulu, Secretary of Penghulu, the subdistrict and district governments disagree society, religious leaders, Traditional leaders, the lack of openness of government so that people are not involved in the division Kepenghuluan in District of Tanjung Medan. As for the obstacles in the formation kepenghuluan that community and religious leaders, ninik mamak kepenghuluan refuse the establishment by reason of fear characteristic kepenghuluan and the right to organize and regulate the majority automatically become lost.

Abstrak: Kendala dan Dampak Pemekaran Kepenghuluan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kendala dan dampak pemekaran kepenghuluan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam pembentukan kepenghuluan di Kecamatan Tanjung Medan adanya pihak setuju dan tidak setuju Camat, Sekcam, Penghulu, Sekretaris Penghulu, pihak pemerintah Kecamatan dan tidak setuju masyarakat, Tokoh agama, Tokoh adat, kurangnya keterbukaan Pemerintah sehingga masyarakat tidak dilibatkan dalam pemekaran Kepenghuluan di Kecamatan Tanjung Medan. Adapun yang menjadi kendala dalam pembentukan kepenghuluan yaitu masyarakat dan Tokoh agama, ninik mamak menolak terhadap pembentukan kepenghuluan dengan alasan takut ciri khas kepenghuluan dan hak untuk mengurus dan mengatur mayoritas otomatis menjadi hilang.

Kata Kunci: kepenghuluan, pemekaran, tokoh masyarakat

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satunya perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintah. Seiring bertambahnya luasnya kewenangan ini, maka aparatur pemerintahan di daerah diharapkan dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan dengan lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Namun dibalik itu semua telah munculnya ide serta tentang pemikiran yang positif.

Langkah kongkrit upaya pengembangan desa antarlain berupa lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu merupakan pengganti berbagai peraturan perundangan mengenai pemerintah desa. Salah satu tujuan dikeluarkan UU No 32 Tahun 2004 adalah guna memodernisasi pemerintah desa agar mampu menjalankan tiga peranan utama,

yaitu sebagai struktur perantara, sebagai pelayanan masyarakat, serta agen perubahan desa. Demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas apapun bentuknya fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang menjadi proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan secara substansial demokrasisasi tidak akan berjalan dengan efektif tanpa perkembangan pengorganisasian internal lembaga-lembaga pemerintahan maupun perkumpulan masyarakat.

Sejak ditetapkannya kebijakan otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah membawa positif pada penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia, termasuk berdampak perubahan status daerah, seperti pemekaran daerah baik provinsi, kabupaten/kota, maupun kecamatan dan kelurahan/desa. Masyarakat di beberapa daerah provinsi, kabupaten, maupun tingkat kecamatan

menuntut pemekaran daerah diharapkan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut terwujud sebuah kebijakan publik untuk meraih tujuan-tujuan yang diinginkan.

Evaluasi kebijakan pemekaran daerah yang dilakukan selama ini antara lain untuk melihat pencapaian tujuan yang diinginkan, meliputi peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Sebab jarang terjadi kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan pemekaran daerah menjadi penting dilakukan melihat perkembangan pembentukan daerah otonom baru saat ini sangat pesat, yang menimbulkan implikasi.

Kecamatan Tanjung Medan merupakan salah satu kecamatan yang baru di Kabupaten Rokan Hilir yaitu terdiri dari 13 kepenghuluan yaitu Kepenghuluan Tanjung Medan, Kepenghuluan Tanjung Medan Utara, Kepenghuluan Tanjung Medan Barat, Kepenghuluan Sei Meranti, Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam, Kepenghuluan Akar Belikar, Kepenghuluan Tangga Batu, Kepenghuluan Perkebunan Tanjung Medan, Kepenghuluan Tanjung Sari, Kepenghuluan Bagan Nenas, dari 13 Kepenghuluan diatas terjadinya proses pemekaran Kepenghuluan yang tidak sesuai dengan PP 72 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 2.

Artinya dalam realitas pembentukan desa baru, pemerintah daerah tidak mengikutsertakan masyarakat dalam hal ini, adalah tokoh ninik mamak. Hal iutu memberikan implikasi bahwa pemekaran ini mendapat resistensi dari kelompok berpengaruh dalam masyarakat. Karena dikhawatirkan akan kelompok berpengaruh dalam masyarakat. Karena dikhawatirkan akan kelompok berpengaruh dalam masyarakat, karena dikhawatirkan akan menghilangkan kekhasan dan untuk mengurus wilayah kepenghuluan adat kebudayaan.

Dalam proses pemekaran kepenghuluan ini tidak dilibatkan tokoh ninik mamak mengindikasikan proses pembentukan tidak dilakukan secara demokrasi dan representatif. Justru yang lebih mendominasi adalah kepentingan elit-elit politik yang ingin memekarkan ini terjadi bahwa pemerintah kabupaten terkesan memaksa dalam pemekaran kepenghuluan di Kecamatan Tanjung Medan.

Pemekaran kepenghuluan adanya penolakan dari tokoh adat ninik mamak. Dalam pemekaran kepenghuluan/tokoh adat dan masyarakat hanya sebelah pihak, yaitu aparat pemerintah kepenghuluan karena unsur politik adanya bagi-bagi kekuasaan ditingkat level kepenghuluan. Pemekaran Kepenghuluan adanya penolakan terhadap pembentukan Kepenghuluan dari kalangan ninik mamak, adanya berbincangan di dalam masyarakat bahwa pemekaran kepenghuluan dilaksanakan oleh aparat pemerintah kepenghuluan saja, tanpa mengikutsertakan tokoh Ninik mamak sehingga dalam pemekaran adanya keterpaksaan memaksa untuk mempercepat pemekaran kepenghuluan. Dampak tidak di ikutsertakan tokoh adat tidak merasa puas dan tersinggung karna, pemekaran kepenghuluan hanya satu belah pihak saja sehingga nanti takut terjadi pemilihan-pemilihan penghulu pakai tunjuk tunjuk saja tanpa memberi kesempatan yang selayaknya menjadi pemimpin.

Pemekaran wilayah merupakan pembagian wilayah dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. (Tarigan, 1990). Pemekaran desa merupakan suatu tindakan memecah desa atau mengadakan kepenghuluan baru, diluar wilayah desa-desa yang telah ada atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul adat setempat maupun sosial budaya masyarakat setempat dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Dengan adanya pemekaran diharapkan dapat menciptakan kemandirian suatu daerah yang rentang kendali pemerintahan, membuka ketimpangan-ketimpangan pembangunan wilayah dan menciptakan perekonomian wilayah desa yang kuat demi tercapainya kesejahteraan sehingga pemkaran wilayah diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat membuka peluang baru bagi upaya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan intensitas pembangunan serta mampu meningkatkan pembangunan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat PP 72 Tahun 2005.

Pemekaran wilayah merupakan pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Kebijakan adalah ilmu

tentang pemerintahan dengan negara ataupun apa yang sesungguhnya dibuat pemerintah secara riil untuk warga negara atau dengan lain ilmu tentang tindakan pemerintahan yang secara praktis bermanfaat atau bernilai.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kendala dan dampak pemekaran kepenghuluan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir.

METODE

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan data yang didapat dari hasil pengamatan dan tujuannya mempertegas serta memperkuat suatu teori, hingga memperoleh informasi mengenai keadaan suatu saat sekarang. Soekanto mengemukakan bahwa penelitian kualitatif itu, yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan tujuan agar dapat membantu di dalam memperkuat teor-teori lama, atau kerangka menyusun teori-teori baru. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir adapun ketertarikan Peneliti mengambil lokasi penelitian adanya fenomena yang terjadi diantara kendala pembentukan pemekaran Kepenghuluan Kecamatan Tanjung Medan. Informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan berdasarkan kemampuan orang-orang yang dijadikan informan tersebut dalam memberikan informasi yang valid. Setelah semua data dari hasil penelitian ini terkumpul maka data yang dikelompokkan menurut jenis dan sumbernya. Adapun teknik pengalisan yang penulis gunakan yaitu teknik analisa deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya sesuai dengan gejala dan permasalahan yang timbul di lapangan kemudian dilakukan interpretasi secara kualitatif sehingga memperoleh kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten kota menjadi daerah atau lebih. Sementara prakteknya sampai tahun 2008, Indonesia belum pernah mempunyai pengalaman

penggabungan daerah, secara umum, pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembagian.

Pemekaran Kepenghuluan di Kecamatan Tanjung Medan dilaksanakan oleh aparat pemerintah yang ingin pemekaran ini terjadi, pemekaran ini terjadi, pemekaran ini dilakukan adanya unsur-unsur politik seperti camat, penghulu, dan para anggota aparat pemerintah yang ikut terlibat dalam pemekaran ini. Hal ini memicu adanya, perselisihan antara pihak masyarakat dan pihak pemerintah dalam melakukan pemekaran kepenghuluan. Kegiatan-Kegiatan yang dilakukan oleh aparat kecamatan dilakukan oleh aparat kecamatan dirumah penghulu Tanjung Medan dimana pihak pemerintah tidak mengundang pihak masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan ninik mamak.

Kepentingan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk memekarkan kepenghuluan di Kecamatan Tanjung Medan, adalah supaya Pilgub (Pemilihan Gubernur) yaitu periode Anas Mamun terpilihnya menjadi Gubernur Riau, maka dimekarkan kepenghuluan untuk bisa memilih dalam pemilihan Gubernur Riau, maka pemilihan tidak secara demokrasi penghulu-penghulu untuk menjadi kepala desa untuk memperoleh suara dalam pemilihan Pilgub.

Pada pemilihan Gubernur Riau tidak memilih secara demokrasi penghulu-penghulu di Kecamatan Tanjung Medan untuk menjadi kepala desa, namun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam proses suara arus bawah tidak demokrasi. Dalam pemekaran pembentukan kepenghuluan baru, dalam pemekaran kepenghuluan ini hanya sebelah pihak saja, yaitu aparat pemerintah saja, pihak ninik mamak tidak diikutsertakan dalam pemekaran kepenghuluan di Kecamatan Tanjung Medan adanya kepentingan-kepentingan elit politik pemerintah kabupaten terkesan memaksa.

Keterlibatan Ninik Mamak dalam Pemekaran Kepenghuluan

Dalam pemekaran Kepenghuluan di Kecamatan Tanjung Medan, pemekaran kepenghuluan

tidak diikutsertakan ninik mamak pemekaran Kepenghuluan hanya dilakukan oleh aparat pemerintah saja tanpa mengikutsertakan ninik mamak dalam pemekaran kepenghuluan ini.

Pemekaran kepenghuluan ini merupakan keinginan, dari pemerintah kabupaten untuk memekarkan kepenghuluan di Kecamatan Tanjung Medan karena adanya kepentingan-kepentingan politik dan adanya perjanjian politik. Ninik mamak ingin pemekaran ini terjadi dari keinginan masyarakat tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat supaya mensejahterakan masyarakat. Ninik mamak merasa pemekaran kepenghuluan ini terjadi bukan semata untuk mensejahterakan masyarakat tetapi untuk kepentingan-kepentingan politik saja. Ninik mamak merupakan tokoh penting dalam pemekaran kepenghuluan, ninik mamak ingin tahu berdampak positif, atau negatif bagi pemekaran kepenghuluan di Kecamatan Tanjung Medan.

Pemenuhan Persyaratan-persyaratan Pemekaran Kepenghuluan

Pemekaran Kepenghuluan di Kecamatan Tanjung Medan Merupakan bagian penting untuk tujuan pemekaran untuk mensejahterkan masyarakat, kesehatan, pendidikan, dan rentang kendali untuk memudahkan masyarakat. Tetapi sering terjadi pemekaran kepenghuluan dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan politik yang ingin pemekaran ini terjadi dan memaksa untuk memekarkan kepenghuluan untuk medan mendapat tingkat kekuasaan dan jabatan yang kuat dalam pemekaran kepenghuluan. Hal ini memicu berbagai peran-peran penting supaya berhasil dengan cara menyuarakan penghulu-penghulu yang ada di kepenghuluan supaya pemekaran ini terjadi tanpa melihat jumlah penduduk, batas wilayah, dan berdampak kepada masyarakat layak atau tidak untuk membentuk desa yang baru, maka dipilihlah penghulu-penghulu tanpa pemilihan secara langsung tanpa pemilihan secara langsung.

Konflik Tapal Batas Wilayah Pasca Pemekaran Kepenghuluan

Batas wilayah merupakan bagian penting dalam pemekaran merupakan syarat untuk mem-

bentuk desa baru, sehingga dalam pemekaran kepenghuluan tidak terjadi berbincangan antara pemekaran desa yang dimekarkan. Supaya aman dan terkendali dan tidak ada desa yang bersinggungan. Pemerintah kecamatan melihat peraturan perundangan yang memahami dalam tapal batas yang selayaknya untuk dimekarkan.

Pemekaran Kepenghuluan di Kecamatan Tanjung Medan pemekaran Kepenghuluan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, uang ingin pemekaran ini terjadi tanpa melihat tapal batas wilayah yang jelas. Kepenghuluan Tanjung Medan berbatasan dengan Kepenghuluan PT Lahan Sakti, Kepenghuluan Tanjung Medan Barat berbatasan dengan Kepenghuluan Sri Kayangan, Kepenghuluan Tanjung Medan Utara berbatasan dengan Kepenghuluan Tanjung Medan, Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam berbatasan dengan Kepenghuluan Akar Belikar, setelah pemekaran batas wilayah yang tidak jelas antara kepenghuluan tersebut hal ini memberi dampak buruk bagi masyarakat karena kalau pemekaran terjadi maka akan terjadi tumpang tindih batas wilayah yang bersinggungan. Pemerintah seharusnya membuat tapal batas wilayah yang jelas setelah pemekaran sehingga tidak terjadi tumpang tindih batas wilayah antara kepenghuluan kepenghuluan yang berbatasan.

Perbatasan dalam pemekaran kepenghuluan sangatlah penting untuk memekarkan kepenghuluan karena kalau belum ada tapal batas wilayah jelas, maka suatu kepenghuluan belum layak untuk dimekarkan. Pemerintah tetap memekarkan kepenghuluan sebelum tahu apa dampaknya kepada masyarakat hal ini merupakan bagian terpenting dalam pembentukan desa baru, pemerintah seharusnya mengikut sertakan musyawarah terlebih dahulu mengajak tokoh adat, tokoh ninik mamak, tokoh masyarakat untuk menetapkan bersama-sama dalam penentuan tapal batas kepenghuluan yang akan dimekarkan.

Batas wilayah merupakan tolak ukur yang penting dalam pemekaran kepenghuluan, merupakan hal penting untuk dikaji karena menyangkut kesejahteraan masyarakat, dan pelayan-pelayan yang diberikan kepada masyarakat.

Tetapi hal ini sangat disayang sekali karena pemerintah kurang memahami arti dari pemekaran yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi memanfaatkan kepentingan politik semata yang tetap memaksa pemekaran. Batas wilayah yang merupakan penentuan berbatasan antara kepenghuluan untuk menunjukkan kejelasan suatu batas kepenghuluan sehingga tidak terjadi batas wilayah dan perselisihan di dalam masyarakat, pemerintah seharusnya lebih bijaksana lagi dalam pemekaran kepenghuluan terutama mengenai tapal batas wilayah kepenghuluan, menghindari terjadinya perselisihan antara kepenghuluan yang berbatasan.

Dampak Pemekaran Kepenghuluan

Maju atau tidaknya suatu wilayah dilihat dari bagaimana kesejahteraan penduduk suatu wilayah, salah satu indikator yang biasa dijadikan landasan suatu wilayah tersebut. Salah satunya adalah pelayanan infrastruktur yang memadai dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat banyak sekali wilayah-wilayah, di Indonesia saat ini yang belum bisa dijangkau oleh pelayanan infrastruktur yang memadai. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya adalah jauhnya lokasi tempat tinggal masyarakat tersebut berada di perbatasan, jauhnya lokasi dan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan kesejahteraan karena cakupan infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat demi tercapainya kehidupan yang lebih baik.

Pemerintah hakekatnya menyelenggarakan fungsi pelayanan menyangkut semua bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan pelaksanaan dipercaya kepada aparat pemerintah tertentu yang secara fungsional atas bidang tertentu pemenuhan kebutuhan yang diberikan oleh pihak yang dimiliki hak atau kemampuan untuk memenuhi pelayanan masyarakat adalah sikap menolong sahabat dan profesional. Yang memuaskan masyarakat datang untuk mengurus pelayanan kepada masyarakat pada hakekatnya, dapat dikatakan sebagai pemenuhan segala kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan urusan administrasi untuk

mempermudah aktivitas masyarakat dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pihak Kepenghuluan kepada masyarakat tidak begitu maksimal karena terlihat kinerja atau tata pemerintahan yang diberikan atau pelayanan sangat berbelit-belit contoh dalam pembuatan surat-menyurat sangat begitu lama sekali, dan lebih parah lagi mengenai kedisiplinan dalam jam kantor atau jam masuk kantor terlihat sangat tidak disiplin pihak pemerintah kecamatan atau pun pemerintah desa atau kepenghuluan belum ada masuk sehingga masyarakat yang berurusan sangat merasa resah.

Dampak Positif:

- a. Meningkatkan lapangan kerja di tingkat aparat kepenghuluan

Dampak Negatif:

- a. Kurangnya tenaga ahli untuk memberikan kontribusi pada kepenghuluan yang belum mapan
- b. Kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
- c. Adanya persaingan bakal calon penghulu yang tidak sehat
- d. Ciri khas Kepenghuluan dan hak untuk mengurus dan mengatur menjadi hilang.

SIMPULAN

Pembentukan Kepenghuluan di Kecamatan Tanjung Medan adanya pihak setuju dan tidak setuju Camat, Sekcam, Penghulu, Sekretaris Penghulu, pihak pemerintah Kecamatan dan tidak setuju masyarakat, Tokoh agama, Tokoh adat, kurangnya keterbukaan Pemerintah sehingga masyarakat tidak dilibatkan dalam pemekaran Kepenghuluan di Kecamatan Tanjung Medan. Kendala pembentukan Kepenghuluan di Kecamatan Tanjung Medan, yaitu masyarakat dan tokoh agama, ninik mamak menolak terhadap pembentukan kepenghuluan di Kecamatan Tanjung Medan, takut ciri Khas Kepenghuluan dan hak untuk mengurus dan mengatur mayoritas otomatis menjadi hilang. Akibatnya, dalam masyarakat terjadi berbincangan Pemekaran Kepenghuluan di Kecamatan secara tidak demokrasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Afrani, Riza Nur. 1996. *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Utama
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Macandrews, Colin. *Hubungan Pusat Daerah dan Dalam Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Mariana, Dede. 2008. *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sadyoutomo, Mulyana. 2009. *Manajemen Kota dan Wilayah*. Jakarta: Bumi Askara
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan*. Tangerang: Media Brilian
- Suyanto, Bagong. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: Raja Grafindo
- Wrihatnolo, Randy. 2011. *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Yakob, 2011. *Demokrasi dan Otonomi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.